



**Pendapat Ahli
Terhadap Kerangka Kebijakan
Penerbitan Efek Bersifat Utang
Berwawasan Sosial (*Social Bond*)
Bank Tabungan Negara Persero**



2025



KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Indonesia selalu berupaya menjadi bagian dari proses peningkatan kemampuan pembangunan nasional maupun daerah. Untuk mewujudkan Tri Dharma tersebut Universitas Indonesia berupaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berbagai Kerjasama telah dilaksanakan selama ini, diantaranya yang terkait dengan penyusunan Pendapat Ahli Keberlanjutan sebagai Penyedia Reviu Eksternal terhadap kerangka kebijakan penerbitan EBUS Sosial Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada SDGs Hub UI, Lembaga Sains Terapan FMIPA Universitas Indonesia untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pendapat Ahli Keberlanjutan sebagai Penyedia Reviu Eksternal terhadap kerangka kebijakan penerbitan EBUS Sosial Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Semoga pendapat dan pemikiran yang tertuang dalam dokumen ini dapat berguna dan memberikan sumbangsih dalam usaha menuju Indonesia yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Koordinator SDGs Hub UI,
Lembaga Sains Terapan, FMIPA Universitas Indonesia



SDGs HUB UI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS HUB
UNIVERSITY OF INDONESIA

Dr. Triarko Nurlambang, MA

Ringkasan Pendapat Ahli

Pendapat Ahli Keberlanjutan diberikan terhadap Kerangka Kebijakan Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial (*Social Bond*) yang selanjutnya disebut “*Social Bond*” yang hendak diluncurkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selanjutnya disingkat BTN. Pendapat Ahli ini menilai Kerangka Kerja kebijakan *Social Bond* BTN dan empat komponen utama di dalamnya, yakni penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana, dan pelaporan, serta menyampaikan risiko dan potensi masalah tersembunyi dalam Kerangka Kebijakan.

Kerangka Kebijakan *Social Bond* BTN memberikan panduan dan kebijakan yang baik untuk pemilihan, implementasi, dan pelaporan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerangka Kerja Kebijakan *Social Bond* BTN menyediakan pendekatan terstruktur untuk pembiayaan berkelanjutan bagi “kegiatan bisnis yang melindungi dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan dan sosial” melalui instrumen Keberlanjutan. Kerangka Kebijakan ini disusun untuk memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Kerangka Kerja Kebijakan tersebut mencakup tiga (3) kategori KUBS yang dianggap memenuhi syarat. KUBS tersebut yaitu layanan infrastruktur dasar yang terjangkau; perumahan yang terjangkau; dan penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro.

BTN telah menyusun langkah-langkah pendekatan dalam melakukan proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying assets*, *Sustainable Finance Working Group* (“SFWG”/Grup Kerja Keuangan Berkelanjutan) BTN akan bertanggung jawab untuk tata kelola dan menerapkan upaya-upaya yang ditetapkan dalam Kerangka Kebijakan ini. Pelaksana proses evaluasi dan pemilihan pembiayaan sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) dalam pemilihan proyek atau kegiatan yang baru, sedang berjalan atau selesai dengan langkah-langkah yaitu usulan proyek dilakukan oleh Unit Bisnis (Misalnya Divisi *Subsidized Mortgage*, Divisi UKM, atau Divisi *Corporate Banking*) dengan mengajukan proyek atau pinjaman yang berpotensi memenuhi kriteria KUBS, kemudian analisis dan persetujuan kredit dilakukan oleh Unit Risiko Kredit sebagai bagian dari proses kredit reguler, dengan menggunakan penilaian risiko ESG yang telah disusun oleh Unit ESG, setelah seluruh aspek risiko dan kelayakan terpenuhi, proyek atau pinjaman dapat disetujui. Peninjauan portofolio dilakukan oleh Unit Institusi Keuangan dan *Unit Treasury*, dan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan *oversight* langsung oleh Komite ESG di tingkat Direksi. Komite ESG meninjau perkembangan *Asset Pool*, mengevaluasi kesesuaian portofolio dengan strategi keberlanjutan BTN, serta memberikan arahan strategis apabila terdapat pinjaman atau proyek yang tidak lagi memenuhi syarat.

BTN telah menerapkan proses *pre-screening* dengan mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima serta menemukenali kegiatan-kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap aspek sosial dan lingkungan untuk mencapai target keberlanjutan. BTN telah menetapkan target tingkat perusahaan atau proyek untuk kinerja sosial, dan sudah memiliki kapasitas internal untuk mengukur dan melaporkan metrik yang paling relevan untuk pelaporan dampak dari kegiatan-kegiatan usaha terhadap sosial, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, dan sudah mengusulkan sejumlah indikator dan estimasi indikator untuk mengukur dampak.

BTN telah mengidentifikasi jenis proyek yang baru dan proyek yang telah ada dinilai memenuhi syarat untuk dibiayai kembali di bawah kerangka proyek, serta telah memberikan gambaran transparan tentang tipe proyek, nilai, dampak yang diharapkan, dan risiko sosial dan lingkungan yang teridentifikasi. Proyek-proyek ini termasuk dalam kategori proyek yang ditentukan dan diharapkan memberikan manfaat sosial yang positif dan nyata, serta dapat sekaligus menambah emisi yang bersih dan dampak lingkungan serta sosial yang memberi manfaat positif. Strategi keberlanjutan BTN diwujudkan melalui pembuatan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). RAKB disusun berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/ POJK.03/2017, dengan skala prioritas pada aspek penyesuaian kebijakan dan tata kelola, pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan, serta pembangunan kapasitas internal Bank. Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) BTN terdiri dari enam pilar utama, yaitu Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*), Perubahan Iklim dan Ekosistem (*Climate Change and Ecosystems*), Manusia dan Masyarakat (*People and Community*), Inklusivitas Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Inclusiveness*), Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan yang Terintegrasi (*Integrated Governance, Risk, and Compliance/IGRC*), serta ESG dalam Rantai Nilai (*ESG in the Value Chain*). RAKB juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja Bank dalam mengendalikan risiko, terutama risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (ESG).

Berdasarkan penilaian keseluruhan atas unsur-unsur kunci di dalamnya yaitu profil perusahaan, penggunaan dana, proses evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana dan pelaporan bagi pelaksanaan EBUS Sosial yang oleh tim ahli dinilai berdasarkan kesesuaian dengan regulasi dan rencana *sustainability* yang kemudian diolah sesuai dengan matriks yang disusun oleh tim ahli, kerangka kebijakan penerbitan EBUS Sosial diberi penilaian **“Berkelanjutan”** oleh SDGs Hub Universitas Indonesia.

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Regulasi	<i>Sustainability</i>	Total Nilai
A.	Profile Perusahaan	3	3	6
B.	Penggunaan Dana	3	2,66	5,66
C.	Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek	3	3	6
D.	Pengelolaan Dana	3	3	6
E.	Pelaporan	3	3	6
Total Nilai		15	14,66	29,66
Nilai rata-rata		3	2,93	5,93
Pendapat Ahli		Berkelanjutan		

Catatan: penilaian dilakukan dengan skala nilai antara -3 sampai 3

1. Pendahuluan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”) berencana meluncurkan *Social Bond*, hal ini sejalan dengan berbagai kesepakatan tingkat global, seperti untuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan termasuk perubahan iklim (Kesepakatan Paris di bawah UNFCCC), dan dengan terjemahan dari kesepakatan-kesepakatan tersebut pada tingkat nasional. Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) telah menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan sesuai dengan arahan visi dan misi presiden terpilih serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Hal ini juga sejalan dengan hasil pada COP29 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada tanggal 11-22 November 2024 merupakan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melakukan negosiasi penting untuk kebijakan iklim internasional, mendorong aksi iklim, dan memajukan kerja sama global dalam menghadapi krisis iklim.

Dalam rangka mewujudkan kesepakatan dan turunan kebijakan nasional tersebut, diperlukan sebuah kebijakan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan pembiayaan. Dalam hal penanganan perubahan iklim, merujuk informasi dalam dokumen *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (KLHK, 2021), kebutuhan pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim pada rentang waktu 2020-2050 sebesar 27,3 miliar USD/tahun¹. Di sisi lain, dana publik yang tersedia untuk penanganan perubahan iklim, hanya sebesar rata-rata 4,08 miliar USD/tahun selama 2018 sampai 2020 (Kemenkeu, 2021). Oleh karena itu, untuk penanganan perubahan iklim, dibutuhkan dana yang lebih besar dari dana yang tersedia.

Saat ini, untuk mencapai target ENDC (*Enhance National Determined Contribution*), APBN menganggarkan 14 persen dari total kebutuhan pembiayaan iklim atau sebesar Rp 76,3 triliun per tahun. Kalau kita hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, maka pendanaan tersebut tidak akan cukup, sehingga ada beberapa strategi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK dan Kementerian Keuangan yang menjadi *focal point* dalam pendanaan aksi pengendalian perubahan iklim (Kemenkeu, 2024)¹.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) aktif menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk program sosial dan lingkungan, dengan penyaluran Rp 43,3 miliar pada Juli 2025. BTN juga berkomitmen pada pengembangan bisnis berkelanjutan dengan target total aset mencapai Rp 515 triliun pada akhir tahun 2025. Selain itu, bank ini juga melakukan penerbitan obligasi untuk mendukung pendanaan bisnis dan kegiatan lainnya.

¹ <https://lestari.kompas.com/read/2025/05/05/070623686/kemenkeu-gelontorkan-rp-763-triliun-per-tahun-untuk-perubahan-iklim>

Sebagai emiten, untuk tujuan tersebut, sebagaimana disyaratkan Peraturan OJK, BTN perlu (1) menyusun sebuah Kerangka Kerja kebijakan atau *Policy framework* dari *Social Bond*, (2) mendapat pandangan ahli keberlanjutan atas Kerangka Kerja Kebijakan dimaksud, dan (3) pandangan ahli tersebut wajib dilampirkan dalam prospektus penerbitan *Social Bond* (Pasal 17 POJK 18/2023).

Emiten telah menunjuk SDGs Hub Universitas Indonesia (SDGs Hub UI) sebagai Penyedia Reviu Eksternal sesuai dengan pasal 13 POJK 18 Tahun 2023. Sebagai lembaga penelitian independen dan nirlaba, SDGs HUB UI memberikan pendapat atas Kerangka Kerja Kebijakan *Social Bond* dan melakukan penilaian Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) dalam *policy framework* tersebut. Pendapat ahli yang diberikan SDGs Hub UI bersandar pada Kerangka Kerja Kebijakan yang diberikan oleh BTN, dokumen dan informasi terkait yang disediakan oleh BTN, serangkaian diskusi bersama BTN, serta referensi kebijakan dan penelitian yang relevan.

Pada dasarnya, pendapat ahli atas Kerangka Kerja Kebijakan *Social Bond* ini untuk digunakan sebagai justifikasi apakah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Efek dimaksud bermanfaat bagi lingkungan dan/atau untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran emiten. Pada saat *Social Bond* diterbitkan untuk mendapatkan dana publik, reviu akan dijalankan secara berkala setiap tahun (*annual review*) selama kurun waktu penetapan masa perencanaan sejak *Social Bond* diterbitkan terhadap penggunaan dana sehubungan dengan pencapaian dan dampak terhadap lingkungan hidup, mitigasi masalah sosial, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Secara konseptual maupun praktis, keberlanjutan tidak dapat dilepaskan dari upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan yang juga mencakup bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Pendapat ahli atau reviu eksternal atas Kerangka Kerja Kebijakan *Social Bond* BTN diberikan melalui sebuah penilaian peringkat. Pemeringkatan dimaksud berdasarkan kategori (a) berkelanjutan, (b) menuju berkelanjutan, dan (c) tidak berkelanjutan.

Penilaian kuantitatif dan penjelasan secara kualitatif dari setiap jenis kegiatan usaha yang diusulkan didasarkan pada kesesuaian sejauh mana kontribusi kegiatan usaha dimaksud bagi manfaat sosial berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan, inklusivitas, dan ketahanan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok rentan. manfaat lingkungan yang berkelanjutan, dan pembangunan berkelanjutan. Skoring yang diberikan pada pemeringkatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran cepat kepada investor dan penilai *Social Bond* secara berarti dan bertanggungjawab pada saat membandingkan kerangka kerja *Social Bond* dengan risiko yang mungkin muncul terhadap sosial, lingkungan hidup, dan keberlanjutan (*sustainability*). Penilaian menggunakan tiga pengelompokan berikut:

1. *Berkelanjutan*. Kegiatan usaha yang menjadi solusi dan direalisasikan hari ini dengan visi jangka panjang di masa depan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan solusi yang memadukan kepedulian lingkungan, mitigasi masalah sosial, dan unsur-unsur keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha dimaksud.
2. *Menuju berkelanjutan*. Kegiatan usaha yang menjadi solusi mewakili langkah-langkah menuju visi jangka panjang, tetapi belum sepenuhnya cukup sesuai dengan kriteria. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan tertentu terkait lokasi atau konteks kegiatan usaha dan solusi dimaksud.
3. *Belum berkelanjutan*. Kegiatan usaha yang tidak berkelanjutan karena kegiatan usahanya belum mewakili atau belum merupakan bagian dari visi jangka panjang.

Penilaian secara keseluruhan ditentukan oleh Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) untuk memastikan manfaat sosial berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan, inklusivitas, dan ketahanan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok rentan. manfaat lingkungan yang berkelanjutan, dan pembangunan berkelanjutan dari KUBS yang ingin dicapai oleh BTN dan yang akan didanai oleh *Social Bond*

2. Profil Bank Tabungan Negara

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor jasa keuangan perbankan, yang berkomitmen untuk beradaptasi dengan perubahan di sektor perbankan dan properti, serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Sejak ditunjuk pemerintah pada tahun 1974 sebagai satu-satunya lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), BTN memegang peran strategis dan historis dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat di Indonesia.

Dalam era keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang semakin menjadi perhatian utama, BTN memahami bahwa transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Dengan mengungkapkan informasi terkait ESG secara jelas dan terbuka, BTN tidak hanya memenuhi tuntutan peraturan, tetapi juga memberikan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, nasabah, dan masyarakat umum. BTN melanjutkan komitmennya yang kuat dalam menerapkan pilar pelestarian lingkungan, sosial, dan (*environmental, tata sosial, kelola and governance/ESG*) sebagai bagian dari upaya menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia. Kinerja BTN dalam melakukan transparansi ESG menunjukkan BTN semakin transparan dalam penerapan ESG.

Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya penghargaan *Best ESG Reporting & Transparency* dari *ESG Initiatives Award* dan penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Kategori “Green Elite” dari Bumi Global Karbon Foundation. Perolehan ini mencerminkan kontribusi positif BTN terhadap pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya mematuhi regulasi, BTN juga menjadi agen perubahan yang proaktif dalam menerapkan standar tinggi dalam pengungkapan ESG (*ESG Disclosure*). Selanjutnya, dalam penerapan ESG yang berkelanjutan, BTN secara resmi telah menandatangani Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perbankan yang Bertanggung Jawab (*UN Principles for Responsible Banking*). Dengan langkah tersebut, BTN menjadi anggota *United Nations Environment Programme Financial Initiative* (UNEP FI), sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong pengembangan industri perbankan yang berkelanjutan (*Sustainable banking industry*) bersama bank-bank di seluruh dunia.

BTN menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perbaikan lingkungan hidup, sosial dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Komitmen ini diantaranya diwujudkan dengan memiliki Enterprise & ESG Risk Management Division yang menangani urusan ESG di BTN. BTN berkomitmen untuk mewujudkan misi ESG-nya, yaitu: *Become the ESG Champion in the banking industry*. Dengan bergabungnya BTN, UNEP FI akan membantu Perseroan dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan (*Sustainable finance*), serta membuka kesempatan berkolaborasi dan bertukar *best practices* berdasarkan Prinsip-Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab. Hal ini akan membantu BTN untuk menjadi pionir keuangan berkelanjutan di industri perbankan dan keuangan di Indonesia.

Sebagai anggota UNEP FI, BTN akan menerapkan Prinsip Prinsip PBB Mengenai Perbankan yang Bertanggung Jawab (*UN Principles for Responsible Banking*), yang merupakan sebuah kerangka kerja untuk mendorong industri perbankan yang berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Climate Agreement*.

BTN telah menunjukkan sejumlah komitmen penerapan pilar ESG dalam bisnis dan operasionalnya. Sebagai contoh, pemasangan panel surya di kantor BTN milik sendiri, pengadaan kendaraan listrik (*EV/Electric Vehicle*) sebagai kendaraan operasional, dan mencantumkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan pada pedoman portofolio (*portfolio guidelines*). Selain itu, BTN turut aktif mempromosikan pembiayaan untuk rumah ramah lingkungan (*green housing*). BTN juga gencar meningkatkan kesadaran (*awareness*) karyawan, vendor, dan nasabah mengenai prinsip keberlanjutan melalui berbagai aktivitas.

BTN menerapkan keuangan berkelanjutan melalui penetapan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang mengacu pada POJK No.51/POJK.03/2017 (“POJK 51”) mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam membangun Indonesia dan mendukung mitigasi perubahan iklim dunia.

BTN mendapatkan beberapa penghargaan atas kegiatan yang dilakukan untuk keuangan berkelanjutan seperti *Global IDEAWARD 2024*, BTN meraih Penghargaan Kreatif untuk Keberlanjutan dan Kreativitas Lingkungan atas inovasi dalam bidang keberlanjutan; *Retail Banking Innovation Awards 2024*, BTN memenangkan dua penghargaan di ajang yang diselenggarakan oleh *The Digital Banker*, sebagai pengakuan atas inovasi dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam bisnisnya; *ESG Initiatives Awards* (EIA) 2024, BTN meraih empat penghargaan sekaligus di ajang ini, menunjukkan komitmennya terhadap penerapan prinsip-prinsip ESG dan kinerja operasional yang berkelanjutan; *Euromoney Awards For Excellence 2024*, BTN dianugerahi sebagai *Indonesia Best Bank for Diversity and Inclusion*, yang sejalan dengan target BTN menjadi ESG Champion, membuktikan program ESG khususnya terkait keragaman dan inklusi berjalan baik; dan dari *detikcom Awards 2024*, BTN memenangkan penghargaan sebagai Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi, menegaskan perannya dalam mendukung pembiayaan yang berkelanjutan.

Social Bond diharapkan menjadi cara untuk mempromosikan dan melaksanakan pembiayaan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola untuk “kegiatan usaha yang melindungi dan/atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan fungsi lingkungan hidup” serta berkelanjutan. Kerangka Kerja Kebijakan *Social Bond* ini telah dirancang untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (POJK) Nomor 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, yang telah sesuai dengan peraturan lainnya yang sejenis baik secara Global, ASEAN, dan Nasional seperti Prinsip-Prinsip Obligasi Sosial (*Social Bond Principles/SBPs*) tahun 2023 yang diterbitkan oleh

International Capital Market Association (ICMA/Asosiasi Pasar Modal Internasional); Prinsip-Prinsip Pinjaman Sosial (*Social Loan Principles/SLPs*) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Loan Market Association (LMA/ Asosiasi Pasar Pinjaman); Standar Obligasi Sosial ASEAN (*ASEAN Social Bond Standards/ ASEAN SBS*) tahun 2018 yang diterbitkan oleh *ASEAN Capital Markets Forum (ACMF / Forum Pasar Modal ASEAN)*. Selain itu, BTN telah berkomitmen untuk mendukung kegiatan yang meneruskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang relevan dengan portofolio proyek BTN saat ini dan yang diharapkan untuk dijalankan ke depan.

BTN telah fokus pada praktik keuangan berkelanjutan dan mengimplementasikan program-program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). BTN telah menciptakan berbagai program dan inisiatif yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) agar dapat terwujud secara nasional.

Sebagai wujud nyata penerapan ekonomi sirkular dalam ekosistem perumahan, BTN meluncurkan program “Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu.” Melalui program ini, nasabah dapat menukarkan hasil pengelolaan sampah bernilai ekonomi sebagai potongan pembayaran angsuran KPR. Inovasi ini membantu meringankan beban finansial rumah tangga, memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, serta mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Dengan menghubungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, program ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip keuangan sosial BTN dalam menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, BTN menerapkan standar internasional dalam upaya perlindungan dan pengelolaan aspek sosial dan lingkungan. BTN juga menyadari pentingnya *Social Bond* sebagai mekanisme krusial untuk mengarahkan investasi ke proyek yang memiliki dampak yang positif terhadap aspek sosial, dan lingkungan dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian ENDC (*Enhance Nationally Determined Contribution*).

BTN telah memiliki *Roadmap ESG* mencakup tiga fase utama, yaitu Fase Aksi (2023-2025), Fase Maju (2025-2026), dan Fase Akselerasi (2026-2028) dengan 24 strategi. Secara internal, dalam rangka mendukung upaya *sustainability*, BTN telah membentuk Komite ESG yang di antaranya memiliki fungsi evaluasi dalam hal pemilihan Sektor Pembiayaan Berkelanjutan. Pembentukan Komite ESG yang memiliki kepedulian terhadap pembiayaan berkelanjutan adalah bukti nyata dari tujuan dan keseriusan perusahaan untuk memastikan pengelolaan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan sosial.

Mempertimbangkan profil perusahaan di atas, BTN dapat dinilai ***sangat baik*** dalam aspek lingkungan hidup, sosial, dan keberlanjutan pembangunan.

3. Pendapat Ahli terhadap Penggunaan Dana Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial (*Social Bond*)

Dalam Kerangka Kerja Kebijakan Penerbitan *Social Bond*, pihak BTN telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat. Kategori proyek yang memenuhi syarat (diuraikan secara rinci pada Bagian Tiga Kerangka Kerja) sebanyak tiga (3) Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) yaitu Layanan Infrastruktur Dasar yang Terjangkau; Perumahan yang terjangkau; dan Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro.

Untuk menghindari pelanggaran atas kriteria kelayakan yang ditetapkan pada proyek EBUS Sosial, telah menetapkan pengecualian kegiatan usaha tidak boleh berkaitan dengan hal-hal di bawah ini:

1. Senjata api dan amunisi ilegal, termasuk perdagangan senjata api ilegal;
2. Terorisme;
3. Alkohol;
4. Penjualan dan produksi narkoba;
5. Pornografi dan prostitusi;
6. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi anak;
7. Perdagangan spesies hewan yang terancam punah;
8. Perjudian;
9. Pacuan kuda;
10. Klub malam, *turkish bath*, dan panti pijat;
11. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan;
12. Pembukaan lahan gambut yang baru;
13. Batu bara;
14. Aktivitas penebangan ilegal;
15. Bisnis-bisnis lain yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kawasan lindung atau situs warisan dunia; dan/atau
16. Bisnis-bisnis lainnya yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah dan peraturan.

Pemilihan kategori proyek KUBS yang memenuhi syarat adalah mekanisme utama untuk memastikan bahwa proyek-proyek terpilih harus memiliki manfaat sosial yang jelas dan berdampak positif terhadap lingkungan secara berkelanjutan, memberikan manfaat sosial berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan, inklusivitas, dan ketahanan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok rentan. Secara fundamental proyek-proyek terpilih meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, pembiayaan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pembiayaan mikro, dan UKM berfungsi sebagai pendorong utama keadilan ekonomi, mendistribusikan peluang dan pendapatan, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal agar lebih tangguh terhadap guncangan. Pembiayaan tersebut diharapkan memberikan stabilitas sosial dan keamanan tempat tinggal, yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan memungkinkan keluarga untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan, sehingga secara keseluruhan, pembiayaan ini membangun masyarakat yang lebih setara, stabil, dan berdaya saing.

Manfaat tersebut tidak terbatas pada upaya untuk mendorong manfaat sosial yang berkelanjutan tersebut tetapi juga menuju pertumbuhan rendah karbon, meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, menjaga, memelihara, dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan, serta menangani kebutuhan sosial. Pemilihan kategori proyek dengan kriteria di atas membuat *Social Bond* BTN dapat memberi kepastian kepada investor bahwa investasi mereka memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan/keberlanjutan serta keuntungan finansial.

Layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga (Baik). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang terjangkau, seperti infrastruktur air minum bersih, hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, dan 17. Pembiayaan untuk hal ini dapat dinilai baik pada kriteria keberlanjutan lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Catatan: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar air minum bersih harus meliputi aspek keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan kesehatan masyarakat.

Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro (Sangat Baik). Kegiatan usaha padat karya dengan penciptaan lapangan kerja baru melalui penyaluran pembiayaan bagi kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 2 Februari 2021. Juga harus memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 1, 8, dan 10. Pembiayaan untuk hal ini dapat dinilai sangat baik pada mitigasi konflik sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Catatan: Prioritas dukungan terhadap kegiatan untuk proyek dalam memfasilitasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Tenaga kerja ini harus memenuhi sesuai dengan usia kerja.

Perumahan yang terjangkau (Sangat Baik). Pembiayaan rumah yang terjangkau kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengacu pada kriteria Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.242/KPTS/M/2020 Tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Lama Masa Subsidi, dan Jangka Waktu Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah

Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan tanggal 24 Maret 2020.

EBUS sosial untuk perumahan yang terjangkau ini harus sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 1 dan 11. Adapun target TPB No. 11 ini ditargetkan pada tahun 2030 untuk menjamin akses bagi semua orang terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, serta layanan dasar, dan meningkatkan kualitas kawasan kumuh. Pembiayaan untuk hal ini dapat dinilai *sangat baik* pada kriteria keberlanjutan dan mitigasi konflik sosial.

Catatan: Perlu dukungan renovasi/ pemulihan terhadap pemukiman penduduk yang rusak diakibatkan oleh bencana.

4. Pendapat Ahli terhadap Evaluasi dan Seleksi Proyek

Pada tahapan evaluasi dan seleksi proyek, BTN telah menerapkan proses *pre-screening* seleksi proyek. Tahapan ini mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima dan melakukan identifikasi kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap sosial dan lingkungan. Unit kerja atau divisi yang terlibat dalam proses seleksi dan evaluasi proyek dan melakukan alokasi penggunaan dana untuk sektor EBUS Sosial sesuai dengan Kerangka Kerja Kebijakan Penerbitan sesuai dengan tata Kelola yang berlaku.

Tahapan evaluasi proyek direncanakan sebagai berikut:

1. Identifikasi usulan dilakukan oleh Unit Bisnis (Divisi *Subsidized Mortgage*, Divisi UKM, atau Divisi *Corporate Banking*) dengan mengajukan proyek atau pinjaman yang berpotensi memenuhi kriteria KUBS sesuai dengan Kerangka Kerja Keuangan Keberlanjutan yang telah ditetapkan Perseroan, dengan tetap memperhatikan daftar pengecualian BTN.
2. Analisis dan persetujuan kredit dilakukan oleh Unit Risiko Kredit sebagai bagian dari proses kredit reguler, dengan menggunakan penilaian risiko ESG yang telah disusun oleh Unit ESG. Apabila tingkat risiko ESG dikategorikan sedang atau tinggi, debitur diwajibkan menyiapkan rencana mitigasi sesuai standar yang berlaku. Setelah seluruh aspek risiko dan kelayakan terpenuhi, proyek atau pinjaman dapat disetujui.
3. Peninjauan portofolio dilakukan oleh Unit Institusi Keuangan dan *Unit Treasury* untuk memastikan kesesuaian dengan kapasitas pendanaan dan strategi portofolio BTN. *Loan account* yang memenuhi kriteria penggunaan dana KUBS kemudian ditandai dan dicatat sebagai bagian dari *Asset Pool* BTN. Untuk pembiayaan kembali (*refinancing*), BTN membatasi usia proyek maksimal tiga tahun ke belakang.
4. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan *oversight* langsung oleh Komite ESG di tingkat Direksi. Komite ESG meninjau perkembangan *Asset Pool*, mengevaluasi kesesuaian portofolio dengan strategi keberlanjutan BTN, serta memberikan arahan strategis apabila terdapat pinjaman atau proyek yang tidak lagi memenuhi syarat.

Sejumlah *modalities* pendukung untuk tahapan seleksi, mitigasi risiko, dan pemantauan pelaksanaan proyek telah dimiliki BTN. Laporan yang dihasilkan menandai faktor-faktor risiko

dan Rencana Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Plan/CAP*) untuk membantu proyek mengatasi faktor risiko; penyusunan CAP dikoordinasikan oleh unit pengelola *sustainability finance*, *Unit Treasury* dan disahkan oleh Kepala Unit Kerja yang Berwenang secara berkala sesuai kebutuhan Bank sejak penandatanganan proyek.

Corrective Action Plan (CAP) ini diperlukan sebagai tindakan atau tahapan perbaikan yang direncanakan untuk menjamin kualitas kinerja dan hasil akhir suatu proses yang diperkirakan mengalami masalah dalam mencapai target jangka pendek dan/atau juga jangka menengah. Jenis masalah dan perbaikan ini dapat melibatkan sistem manajemen dan operasional produksi, sumber daya manusia, pemasaran, dan juga finansial dalam proses implementasi suatu rencana bisnis. Dengan adanya CAP ini maka proses pencapaian akan lebih terkendali dan selaras sehingga kinerjanya dapat lebih efektif dan efisien. Sementara dalam konteks mencapai target keberlanjutan dan juga lingkungan serta sosial dapat juga ditangani oleh unit kerja yang mengurus keberlanjutan atau ESG.

Secara keseluruhan, proses evaluasi dan pemilihan proyek dapat dinilai *sangat sesuai*. Dalam hubungannya dengan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan keberlanjutan, dapat dinilai *sangat baik* dengan mempertimbangkan bahwa BTN memiliki sistem dan menjalankan evaluasi secara berkala untuk pemilihan kegiatan umum berwawasan sosial baru, sedang berjalan, maupun yang telah selesai yang akan dibiayai melalui penerbitan *Social Bond*. Pertimbangan lain dalam pemilihan proyek adalah BTN akan memilih proyek yang dipandang layak dan dinilai sesuai dengan tujuan KUBS yaitu melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan taraf hidup, memitigasi konflik sosial, dan ikut serta menyejahterakan masyarakat.

5. Pendapat Ahli terhadap Pengelolaan Dana Penerbitan *Social Bond*

Pengelolaan dana hasil penerbitan *Social Bond* diuraikan sebagai berikut:

1. BTN akan mengalokasikan dana hasil Penawaran Umum EBUS Sosial untuk membiayai atau membiayai kembali proyek/aset yang sesuai dengan kriteria dan memastikan bahwa alokasi dana telah disalurkan untuk membiayai atau membiayai kembali aset yang sesuai dengan kriteria KUBS.
2. Proyek-proyek dan aset yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum *Social Bond* tersebut kemudian ditandai dan dipantau secara berkala untuk memastikan kesesuaian alokasi dana. BTN dapat melakukan penggantian aset atau penambahan aset lainnya yang masih berada dalam sektor KUBS apabila menurut hasil pemantauan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti adanya aset yang telah jatuh tempo, pelunasan dipercepat, atau hal-hal yang relevan lainnya sehingga secara keseluruhan syarat alokasi portofolio di sektor KUBS terpenuhi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023.
3. BTN berencana untuk mencapai alokasi penuh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berlandaskan Sosial untuk membiayai dan/atau membiayai kembali proyek/aset yang sesuai dengan KUBS yang memenuhi POJK No. 18/POJK.04/2023 setelah dana hasil penerbitan diterima.

Alokasi utilisasi penggunaan seluruh dana hasil penerbitan *Social Bond* dipenuhi selambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah penerbitan. Tim Teknis dan Kepala Unit Kerja yang berwenang wajib untuk menjaga ketersediaan *buffer underlying* pembiayaan KUBS (EBUS Sosial) di atas nominal instrumen yang diterbitkan hingga *Social Bond* jatuh tempo.

Mengikuti alokasi dana dalam POJK 18/2023, dana yang diperoleh akan dialokasikan pada kriteria KUBS (EBUS Sosial) yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai Kerangka Kerja Kebijakan Penerbitan *Social Bond*. BTN akan mengelola dana hasil penawaran umum *Social Bond* dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil tersebut dengan membuat akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan, sebagaimana diatur oleh regulator. Penyampaian laporan diharapkan menjadi sarana informasi dan *monitoring* atas penyaluran dana hasil penerbitan *Social Bond*.

BTN dapat menempatkan dana yang tertunda realisasi atau alokasi penggunaannya ke sektor KUBS (EBUS Sosial) dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid atau sektor pembiayaan lainnya di luar KUBS seperti dapat sementara waktu diinvestasikan sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Aset dan Kewajiban (ALMA), di mana BTN harus tetap melaporkan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. BTN diharapkan menyampaikan rencana, upaya-upaya, dan laporan lain yang dipersyaratkan apabila terdapat perubahan status *Social Bond*.

Proyek-proyek yang akan didanai memberikan dampak sosial positif yang terukur seperti jumlah lapangan kerja yang tercipta tetapi juga mendukung Prinsip Keadilan Transisi (*Just Transition*) dengan memastikan bahwa transformasi menuju ekonomi berkelanjutan turut membawa kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Pendapat Ahli terhadap Pelaporan

Peraturan OJK Indonesia mensyaratkan perhitungan dan pelaporan dampak manfaat proyek bagi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, BTN akan memberikan laporan berkala atas dampak proyek/aset yang dibiayai terhadap sosial dan lingkungan sepanjang dampak atau manfaat tersebut dapat dihitung dan diukur secara praktis sesuai dengan kajian dan tinjauan dari eksternal revidu menggunakan salah satu dan/atau lebih indikator yang sesuai dan dapat digunakan.

Untuk memastikan kepatuhan, BTN akan mengamanatkan eksternal revidu untuk memberikan kepastian melalui laporan tahunan pada basket portfolio pembiayaan per segmen EBUS Sosial dan keselarasan dengan kerangka kerja kebijakan *Social Bond*. Laporan auditor akan dilampirkan pada laporan tahunan dan diungkapkan kepada publik, sesuai peraturan OJK Indonesia, BTN akan menerbitkan laporan alokasi pendanaan tahunan untuk portofolio tersebut yang akan dicantumkan pada salah satu atau lebih laporan perusahaan seperti *annual report*, *sustainability report* yang akan tersedia di situs <https://www.btn.co.id/id/About/Investor-Relation/Company-Report/Sustainability-Report>

selama masa *Social Bond* BTN yang diterbitkan berdasarkan kerangka tersebut dalam peredaran. Menjadi pertimbangan penting untuk opini pelaporan, antara lain, BTN akan melakukan pelaporan secara berkala satu (1) kali dalam satu (1) tahun setelah penerbitan *Social Bond* dan setiap kali terjadi perubahan material KUBS bersama dengan laporan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Reviu Eksternal yang sesuai dengan persyaratan POJK 18/2023.

Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, aspek pelaporan dapat dinyatakan *sangat baik*. Adapun berkenaan dengan indikator *impacts reporting*, dapat dinilai *sangat baik* karena 100% indikator-indikator tersebut sesuai dan sepadan. Secara lebih rinci, dari 3 sektor EBUS Sosial yang dalam pandangan BTN memenuhi syarat, terdapat tujuh (7) indikator kuantitatif yang relevan di seluruh sektor KUBS tersebut, dimana indikator-indikator tersebut dapat digolongkan sebagai “sesuai” (5 indikator), “sepadan” (2), dengan metrik yang diajukan untuk mengukur dampak *Social Bond* BTN berdasarkan regulasi yang terkait dengan indikator-indikator dampak tersebut (lihat Lampiran 2). Mengingat cakupan dan isu sosial yang luas dan kompleks, indikator-indikator dampak yang diusulkan tersebut perlu didukung dengan pedoman teknis maupun dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.

7. Risiko dan Potensi Masalah Tersembunyi dalam Kerangka Kerja ini

Risiko ataupun potensi masalah yang dapat ditimbulkan oleh berbagai kegiatan KUBS yang akan ditetapkan dalam *Social Bond* BTN ini dapat dikurangi bahkan dihindari melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang mempertimbangkan keberlanjutan. Risiko ini tidak hanya mencakup ditimbulkan oleh proses bisnis yang mempengaruhi kinerja perusahaan tetapi juga lingkungan kerja serta lingkungan sekitar *value chain* yang terbentuk dari proses bisnis yang dijalankan.

Perhatian terhadap risiko dan potensi masalah ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan proses bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman akan sistem yang bekerja secara komprehensif. Manajemen risiko perlu menjadi standar yang secara sistematis dilaksanakan dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala. Penanganan ini harus menjadi satu unit tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan pelaksana kegiatan yang bersangkutan atau pemilik kegiatan yang bersangkutan. Pada akhirnya, manajemen risiko yang mencakup nilai-nilai ideal lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan perlu menjadi bagian terpadu dari proses membangun budaya organisasi pelaksana *Social Bond*.

BTN telah menetapkan target tingkat perusahaan untuk kinerja lingkungan (termasuk pencapaian karbon netral atau *net zero* untuk mendukung target Peningkatan Kontribusi Nasional Republik Indonesia pada tahun 2060. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat untuk mengatasi krisis iklim.

Lebih dari itu, meskipun telah ada proses yang terbukti efektif untuk menandai masalah lingkungan dan mengidentifikasi tindakan mitigasi melalui *Corrective Action Plan (CAP)*, pada saat ini tidak ada persyaratan bahwa tindakan mitigasi yang diidentifikasi dalam CAP dipenuhi sebelum kontrak ditandatangani dan proyek diluncurkan, kecuali untuk pengadaan izin yang diwajibkan oleh hukum Indonesia.

BTN telah memilih tiga (3) proyek KUBS yang ada untuk pembiayaan dan pembiayaan kembali dengan penerbitan *Social Bond* dalam Kerangka Kerja Kebijakan ini. Pada saat ini, proyek-proyek ini sudah ditinjau oleh Prinsip Sosial dan Lingkungan BTN.

Risiko dapat muncul pula akibat keterbatasan atau ketiadaan kapasitas untuk menjalankan peran-peran tertentu yang disyaratkan atau diminta dalam Kerangka Kerja Kebijakan ini. Kapasitas BTN untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan metrik dampak yang mulai timbul dari penyelenggaraan EBUS Sosial tertentu belum tersebar merata. Walaupun BTN sudah menunjukkan komitmen untuk mencegah sebelum atau mengatasi setelah kejadian nanti, diperlukan kerja sama erat dengan (beberapa) institusi yang memiliki reputasi, kredibilitas dan pengalaman kuat untuk membangun kapasitas tersebut. Dengan kata lain disinilah pentingnya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik (tahunan) untuk dapat menelusuri (*tracking*) perkembangan yang terjadi.

Lampiran 1.

Nilai Pendapat Ahli atas Kerangka Kerja

1A. Hasil penilaian

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Regulasi	<i>Sustainability</i>	Total Nilai
A.	Profile Perusahaan	3	3	6
B.	Penggunaan Dana	3	2,66	5,66
B1	KUBS			
B1.1	Layanan Infrastruktur Dasar yang Terjangkau Baik dari Segi Akses maupun Harga		2	
B1.2	Perumahan yang Terjangkau		3	
B1.3	Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro		3	
C.	Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek	3	3	6
C1	Kelengkapan Organisasi			
C2	Proses Evaluasi			
C3	Proses Pemilihan			
D.	Pengelolaan Dana	3	3	6
D1	Konsep Pengelolaan			
D2	Monitoring			
D3	Respon/Tindakan perbaikan			
E.	Pelaporan	3	3	6
E1	Pelaporan Alokasi Dana			
E2	Impact Reporting			
Total Nilai		15	14,66	29,66
Nilai rata-rata		3	2,93	5,93
Pendapat Ahli		Berkelanjutan		

1B. Rubrik Penilaian

Nilai	Regulasi	Berkelanjutan
3	Sangat sesuai	Sangat baik
2	Sesuai	Baik
1	Cukup Sesuai	Cukup
0	Netral	Netral
-1	Kurang Sesuai	Kurang baik
-2	Tidak sesuai	Tidak baik
-3	Sangat tidak sesuai	Sangat tidak baik

Nilai	Kategori berkelanjutan
>4-6	Berkelanjutan
>1-4	Menuju Berkelanjutan
≤ 0	Tidak Berkelanjutan

Lampiran 2.

Ilustrasi kesepadanan indikator dampak kuantitatif yang relevan untuk *Social Bond* BTN dengan regulasi terkait

Tipe Kegiatan	Sektor EBUS Sosial yang Memenuhi Syarat	Indikator Dampak Kuantitatif yang Relevan	Relevansi Regulasi	Capaian SDGs yang Didukung
KUBS	Infrastruktur Dasar yang Terjangkau	Jumlah proyek infrastruktur air yang dibuat atau ditingkatkan	<p>Sesuai. Indikator ini Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan peraturan presiden yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), yang merupakan turunan dari RPJPN. Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman.</p>	<p>SDG 1: Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>) - Karena akses terhadap layanan dasar yang terjangkau mengurangi beban biaya hidup masyarakat miskin.</p> <p>SDG 2: Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>). Karena ketersediaan air bersih dan irigasi yang memadai (bagian dari pengelolaan sumber daya air) penting untuk produksi pangan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan.</p> <p>SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (<i>Good Health and Well-being</i>) - Karena layanan kesehatan yang terjangkau adalah infrastruktur sosial yang penting. Target 3.8 berbicara tentang mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko finansial, akses ke layanan kesehatan esensial berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau.</p> <p>SDG 4: Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>) - Karena akses ke gedung sekolah yang layak, fasilitas air/sanitasi di sekolah, dan akses internet yang terjangkau juga merupakan infrastruktur dasar untuk pendidikan.</p> <p>SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (<i>Clean Water and Sanitation</i>) Tujuan utama: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Relevansi: Layanan air bersih dan sanitasi yang layak adalah infrastruktur dasar esensial.</p>
		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke air bersih	<p>Sesuai. Indikator Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan peraturan presiden yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), yang merupakan turunan dari RPJPN. Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman.</p>	

Tipe Kegiatan	Sektor EBUS Sosial yang Memenuhi Syarat	Indikator Dampak Kuantitatif yang Relevan	Relevansi Regulasi	Capaian SDGs yang Didukung
		<p>Peningkatan rasio cakupan layanan untuk air minum</p>	<p>Sesuai. Indikator ini sesuai dengan peraturan perundangan adalah target dengan air minum layak. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).</p>	<p>Target SDG 6 secara spesifik berfokus pada akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan sanitasi serta kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dengan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok rentan.</p> <p>SDG 7: Energi Bersih dan Terjangkau (<i>Affordable and Clean Energy</i>) Tujuan utama: Menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Relevansi: Ini adalah SDGs yang paling jelas menyebutkan akses dan terjangkau terkait infrastruktur/layanan dasar. Target 7.1 secara eksplisit berbunyi: "Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern."</p> <p>SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>) Tujuan utama: Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Relevansi: Tujuan ini secara langsung berfokus pada pembangunan infrastruktur secara umum. Target 9.1 bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata untuk semua. Target 9.c secara khusus menyebutkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan dan mengupayakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet.</p> <p>SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>)</p>



Tipe Kegiatan	Sektor EBUS Sosial yang Memenuhi Syarat	Indikator Dampak Kuantitatif yang Relevan	Relevansi Regulasi	Capaian SDGs yang Didukung
				<p>Tujuan utama: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Relevansi: Mencakup infrastruktur pelayanan kota dan transportasi. Target 11.2 bertujuan untuk menyediakan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan lestari bagi semua. Selain itu, penyediaan layanan infrastruktur dasar yang terjangkau secara harga dan akses juga mendukung tercapainya:</p> <p>SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>). Karena Proyek air bersih seringkali membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (kemitraan multipihak) untuk pendanaan dan implementasi yang sukses.</p>

Tipe Kegiatan	Sektor EBUS Sosial yang Memenuhi Syarat	Indikator Dampak Kuantitatif yang Relevan	Relevansi Regulasi	Capaian SDGs yang Didukung
KUBS	Perumahan yang Terjangkau	Jumlah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh bantuan finansial untuk pembiayaan rumah terjangkau.	Sesuai. Indikator dimaksud Sesuai dengan indikator umum pembiayaan rumah yang terjangkau kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengacu pada kriteria Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.242/KPTS/M/2020 Tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Lama Masa Subsidi, dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan tanggal 24 Maret 2020, serta Kriteria penghasilan (Permen PUPR No. 5 Tahun 2025).	<p>SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>) Ini adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang paling utama dan spesifik membahas tentang perumahan. Tujuan utama: Menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Relevansi: Target 11.1 secara eksplisit menargetkan: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan dan layanan dasar yang memadai, aman dan terjangkau, dan mengurangi permukiman kumuh. Perumahan yang terjangkau (<i>affordable housing</i>) merupakan sasaran utama dari tujuan ini untuk memastikan semua penduduk memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.</p>
				<p>SDG 1: Tanpa Kemiskinan (<i>No Poverty</i>) Perumahan yang terjangkau memiliki dampak besar dalam mengurangi beban ekonomi pada rumah tangga miskin. Tujuan utama: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Relevansi: Biaya perumahan sering menjadi pengeluaran terbesar bagi rumah tangga. Dengan menyediakan perumahan yang terjangkau, beban finansial rumah tangga miskin dan rentan dapat dikurangi, sehingga mendukung mereka untuk keluar dari kemiskinan.</p>

Tipe Kegiatan	Sektor EBUS Sosial yang Memenuhi Syarat	Indikator Dampak Kuantitatif yang Relevan	Relevansi Regulasi	Capaian SDGs yang Didukung
KUBS	Menghasilkan Lapangan Kerja, dan Program-Program yang Dirancang untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Pengangguran yang Berasal dari Krisis Sosial Ekonomi	Jumlah dan nilai pinjaman ke UMKM	Sesuai. Indikator ini sesuai dengan Jumlah UMKM yang dibiayai di Indonesia diatur dan didorong oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini merevisi beberapa ketentuan dari UU UMKM sebelumnya dan mengatur kriteria serta jenis pembiayaan yang harus disalurkan, termasuk program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk mendorong akses pendanaan bagi UMKM.	SDG 1: Tanpa Kemiskinan (No Poverty) Program-program tersebut juga berkontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan. Tujuan utama: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Relevansi: Penciptaan lapangan kerja dan pembiayaan UKM/mikro (seperti kredit mikro) menyediakan sumber pendapatan yang stabil dan memberdayakan masyarakat miskin dan rentan untuk keluar dari kemiskinan. Target 1.a berkaitan dengan memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari beragam sumber, termasuk melalui peningkatan kerja sama pembangunan, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terprediksi bagi negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan guna mengakhiri kemiskinan dalam segala dimensinya. Program pembiayaan mikro termasuk dalam upaya mobilisasi sumber daya ini.
		Portofolio pembiayaan UMKM berdasarkan distribusi sektor	Sepadannya. Indikator Jumlah dan nilai pinjaman kepada perkreditanyang akan diberikan kepada UMKM terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kriteria jumlah dan nilai pinjaman diatur dalam peraturan tersebut membantu menentukan klasifikasi UMKM (Mikro, Kecil, Menengah), yang juga mempengaruhi kriteria untuk pembiayaan.	SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Mendukung SDG ini dengan Target 8.5: Mencapai lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan layak (<i>decent work</i>) bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, serta upah yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama; Target 8.3: Mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan, yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
		Jumlah UMKM yang diberikan pembiayaan	Sepadannya. Indikator ini sepadan di Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang pedomannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Pertanian, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian.	SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Mendukung SDG ini dengan Target 8.5: Mencapai lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan layak (<i>decent work</i>) bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, serta upah yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama; Target 8.3: Mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan, yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tipe Kegiatan	Sektor EBUS Sosial yang Memenuhi Syarat	Indikator Dampak Kuantitatif yang Relevan	Relevansi Regulasi	Capaian SDGs yang Didukung
				SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan (<i>Reduced Inequalities</i>) Program ini juga dapat mendukung pengurangan ketimpangan. Tujuan utama: Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara. Relevansi: Penciptaan lapangan kerja, terutama bagi kelompok rentan atau daerah tertinggal, serta penyediaan akses pembiayaan yang inklusif melalui UKM/mikro, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Keterangan: (1) “**sesuai**” = indikator dimaksud sama dengan indikator yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur indikator tersebut atau hal-hal terkait indikator tersebut; (2) “**sepadan**” = indikator dimaksud dapat digunakan bersama-sama, berinteraksi dengan, atau memperkuat indikator yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur indikator tersebut atau hal-hal terkait indikator tersebut tanpa memerlukan perubahan atau penyesuaian berarti pada indikator dimaksud; (3) “**mungkin sepadan**” = indikator dimaksud mungkin dapat digunakan bersama- sama atau berinteraksi dengan indikator yang sudah ada dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat mengatur indikator tersebut atau hal-hal terkait indikator tersebut tanpa memerlukan perubahan atau penyesuaian berarti pada indikator dimaksud; (4) “**tersirat**” = indikator dimaksud mengandung unsur-unsur yang menunjukkan kemungkinan kesesuaian atau kesamaan, walaupun secara tidak langsung, dengan indikator yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur indikator tersebut atau hal-hal terkait indikator tersebut.

Lampiran 3.

Daftar dokumen yang ditinjau untuk pemberian pendapat ahli

No	Dokumen	Deskripsi
1	Kerangka Kerja Kebijakan <i>Social Bond</i> BTN 2025	Dokumen kerangka kerja berisi profil emiten, kesesuaian dengan regulasi, penjelasan kerangka kerja, dan eksternal reviu
2	Draft Prospektus <i>Social Bond</i> BTN	Informasi mengenai penawaran umum
3	<i>Sustainability Report</i> BTN 2024, 2023	Informasi mengenai kinerja ESG BTN 2023, dan 2022, dan 2023
4	<i>Annual Report</i> BTN 2024, dan 2023	Dokumen berisikan laporan manajemen, tanggungjawab ESG Perusahaan 2023 dan 2022.
5	Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan dapat berupa: a. EBUS Lingkungan; b. EBUS Sosial; c. EBUS Keberlanjutan; d. Sukuk Wakaf; e. EBUS Terkait Keberlanjutan; dan f. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6	Narasi RPJPN 2025-2045	Penjelasan tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional dengan prioritas Pembangunan nasional dari tahun 2025 sampai tahun 2045 (Indonesia Emas)
7	Renstra 2025-2029 untuk Kemen PUPR, Kemennaker, Kemenkes, Kemendikbud	Merupakan rencana strategis Pembangunan lima tahunan (tahun 2025-2029) untuk sektor Pembangunan PUPR, Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga-Kerjaan untuk Tingkat nasional yang juga di dalamnya tercakup prioritas pembangunan di daerah.

Catatan: Selain dokumen-dokumen tersebut ini, terdapat sejumlah bahan dan nota dalam rangkaian diskusi bersama berbagai unit di BTN yang menjadi rujukan informasi penilaian untuk Pendapat Ahli ini. Di luar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral dikutip dalam memberikan penilaian (dan ditampilkan pada Lampiran 2).

Lampiran 4. Tentang SDGs Hub Universitas Indonesia

SDGs HUB UI berdiri dan diresmikan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 oleh Bapak Prof. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). SDGs HUB UI melayani sebagai hub atau penghubung dari semua aktivitas dan program berkaitan dengan pencapaian dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di kawasan Universitas Indonesia, nasional, regional dan internasional yang memayungi topik seputar isu ekonomi, sosial, lingkungan dan tata-kelola. Selain itu, SDGs HUB UI merupakan badan yang ditunjuk sebagai koordinator utama dari UN *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) untuk wilayah Indonesia, yang mana SDSN memiliki kantor pusat di Columbia University, New York. Saat ini, kami telah melaksanakan berbagai kerja sama dengan mitra pembangunan seperti konsultan dan *think tanks*, pemerintah, swasta, organisasi internasional, dan filantropi. Lingkup kerja sama yang dapat dilakukan oleh SDGs Hub UI meliputi bidang-bidang sebagai berikut: konsultasi dan pendampingan penyusunan RTRW, RDTR, RPJM, penyusunan SPO untuk *Green Bonds*, *Sustainable Bond*, dan lain-lain; pembentukan dan analisis kebijakan; pelatihan dan pembangunan kapasitas; invensi dan Inovasi; dan dampak investasi dan efisiensi. Dalam melaksanakan tugas dan proyek, SDGs HUB UI menjembatani klien dengan tenaga ahli yang memiliki berbagai latar belakang bidang ahli.



Lampiran 5. Credentials Tenaga Ahli

1. Dr. Triarko Nurlambang, MA

<i>Name</i>	<i>Triarko Nurlambang</i>
<i>Contact Details</i>	<i>Mobile: +628129478287 Email : triarko@gmail.com</i>
<i>Education</i>	<i>(2013) PhD in Public Policy, Social and Political Sciences Faculty, University of Indonesia</i> <i>(1994) Master of Arts in Social Sciences (Geography) in The Flinders University of South Australia, Adelaide, Australia</i> <i>(1992) Graduate Diploma in Geography in The Australian National University Graduate Diploma in Geography</i> <i>(1987) Bachelor in Geography, Mathematic and Natural Sciences Faculty, University of Indonesia</i>
<i>Other Training</i>	<i>(2007/8) One year Course on Soft Skills (U-Theory), Non-degree in Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA</i>
<i>Main Position</i>	<i>Lecturer and researcher, University of Indonesia (1988 – now)</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Lecturer on bachelor program in Geography (FMIPA UI)</i> ● <i>Lecturer on master program in Geography (FMIPA UI), Disaster Management (SIL-UI), Environmental Science (SIL), and Oceanic Science (FMIPA UI)</i>
<i>Other Job Position</i>	<i>(2015 – 2020) Independent Director (Komisaris Independen) PT (Persero) Pengembangandan Pariwisata Indonesia (ITDC)</i> <i>(2016 - now) Member of Research Center for Disaster Risk and Response UI (2018 – now) Coordinator of SDGs Hub UI</i> <i>(2018 – now) Member of ISER (Institute for Sustainable Earth and Resources)</i> <i>(2015 – now) Vice President of Indonesian Experts on Disaster Association Consultant/ researcher/ trainer</i>
<i>Membership in Professional Societies</i>	<i>(2014 - 2021) Vice Director and treasury affairs. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) – Indonesian Forum of Disaster Expert</i> <i>(2024-now) Advisory - Indonesia Experts on Public Policy</i> <i>(2020 - now) Vice division head for cooperation. Ikatan Geografer Indonesia (Indonesia Geographer Association)</i> <i>(2016 - now) Member of Local and Regional Development Forum. International Geography Union</i>

Employment Record (especially for Disaster/Hazard Management and SEA/Strategic Environmental Assessment and SDGs, especially Sustainable Finance)

<i>Dates of employment</i>	<i>Name of employing organization</i>	<i>Positions held</i>
<i>2025</i>	<i>SDGs HUB UI and BRI, Mandiri, IIF, BNI, Bank Jabar, PT Spindo, PT Titan, Mandiri</i>	<i>Expert s in the Making of SPO (Secondary Party Opinion) for Green Bond Framework, Sustainable Bond, Sustainable Linked Bond and Annual Report</i>
<i>2024</i>	<i>SDGs Hub UI and PT TBS, PT Spindo, BSI, PT Pollux, BRI, BNI, BJB</i>	<i>Expert s in the Making of SPO (Secondary Party Opinion) for Green Bond Framework, Sustainable Bond, Sustainable Linked Bond and Annual Report</i>

2023	SDGs Hub UI and PT Arkora, PT Indonesia Infrastructure Finance, BRI (Green Bond Annual Report 2023)	Expert s in the Making of SPO (Secondary Party Opinion) for Green Bond Framework and Annual Report
2022	SDGs Hub UI and Pegadaian	Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Pegadaian
2022	SDGs Hub UI and Bank Mandiri	Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Bank Mandiri
2022	SDGs Hub UI and BRI	Experts for the Environmental Expert Opinion on BRI Green Bond Framework
2022	SDGs Hub UI and DKI Jakarta Local Government	SEA for the Integration of Jakarta Spatial Planning and Sea and Coastal Planning
2021/2022	Asian Development Bank/UCLG	National Consultant for SDGs Snapshot at Sub-National Government
2021-2024	BNPB-BMKG-World Bank	Member of Technical Advisor Commission for IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiative Project)
2021	National Standard Agency (BSN)	Member Technical Commission for Disaster Management
2021	National Board for Geospatial Information (BIG)	Consultant (National Roadmap for Geospatial Information Industry)
2021/2022	Palladium (Australia)-BNPB	Consultant (Disaster Risk Assessment in Bangli District, Bali Province)
2013/4 and 2014/5	BNPB	Researcher on Weather Extreme and Disaster Management in Indonesia
2012	UNDP-RCCC (Research Center for Climate Change) UI	Researcher on Climate Change and public health in DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali and Kalimantan Tengah.
2009	The World Bank	Expert member for Climate Resilience Cities Program
2006	Bappenas and UNDP	Team Leader and Regional Development Sp. (Aceh Tsunami Disaster Recovery)

Publications (selected)

No	Publications
1	Nurlambang, Triarko, Hafid Setiadi, dan Nurul, 2008. <i>Assessing Role and Function of Local Coordinator Board on Spatial Planning, The GTZ and Ministry of Home Affairs.</i>
2	Nurlambang, Triarko, and Jeffrey Neilson, 2010. <i>Multi-scalar environmental governance and the emergence of spatial approaches to natural resource management in Indonesia? presented at SEAGA International Conference in Hanoi, Vietnam</i>
3	Nurlambang, Triarko, 2018/19. <i>Geographic And Institution Matters In Achieving Sustainable Development In Indonesia, a book chapter of Dilemmas of regional and local development, Jerzy Bański (editor), Routledge publisher</i>
4	Nurlambang, Triarko and Rudi P. Tambunan, 2021. <i>Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam Metode dan Kajian Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, editor Prof Dr. Jatna Supriatna (2021)</i>
5	Nurlambang, Triarko dan David Makes, 2021. <i>Kajian Pariwisata Berkelanjutan, dalam Metode dan Kajian Sumber Daya Hayati dan Lingkungan, editor Prof Dr Jatna Supriatna (2021)</i>

2. Dr. Sri Mariati

Name	Sri Mariati
------	-------------

<i>Contact Details</i>	<p><i>Mobile Phone: +6281318454688; +628127567765</i> <i>Email: cici.srimariati@gmail.com</i></p>
<i>Education</i>	<p><i>(Sep 2011-Dec 2013) Doctor on Environmental Studies, Universitas Indonesia, Depok.</i></p> <p><i>(Sep 2001- Mar 2004) MSc on Environmental Studies, Universitas Andalas (Padang)</i></p> <p><i>(Sep 1991-May 1996) BSc on Marine Science, Universitas Riau, Pekanbaru</i></p>
<i>Professional Experiences</i>	<p>3. As an Environmental and Sustainability Expert</p> <p>a. Position: Team Leader Client: PT SPINDO Tbk Year: October 2025 Description of service: Review Annual Report of PT SPINDO’s Sustainability Link Bond</p> <p>b. Position: Team Leader Client: PT Bank Mandiri Year: September 2025 Description of service: Review Sustainability Bond Policy Framework of Bank Mandiri</p> <p>c. Position: Team Leader Client: PT Titan Infra Sejahtera Group Year: July-September 2025 Description of service: ESG Performance Report TIS Group 2025</p> <p>d. Position: Team Leader Client: PT Pupuk Indonesia Tbk Year: May-July 2025 Description of service: ESG and Sustainability Capacity Building</p> <p>e. Position: Team Leader Client: PT BNI Year: June 2025 Description of service: Review Annual Report of Bank BNI’s Green Bond</p> <p>f. Position: Team Leader Client: PT Indonesia Infrastructure Finance Year: Mei 2025 Description of service: Review Annual Report of PT IIF’s Green Perpetual Note.</p> <p>g. Position: Team Leader Client: PT BSI Year: April 2025 Description of service: Review Annual Report of Bank BSI’s Sukuk Keberlanjutan.</p> <p>h. Position: Team Leader Client: PT Bank Mandiri Year: January 2025 Description of service: Review Annual Report of Bank mandiri’s Green Bond</p> <p>i. Position: Team Leader Client: PT Bank BRI Year: January 2025</p>

	<p>Description of service: Review Annual Report of Bank BRI's Green Bond Phase 1,2,3, MTN Annual Report 2024, and Sub Ordinary Annual Report 2024.</p> <p>j. Position: Team Leader Client: PT Arkora Hydro Tbk Year: Desember 2024 Description of service: Review Annual Report of Arokora Hydrol's Green Bond,</p> <p>k. Position: Team Leader Client: bank bjb Year: June 2024 Description of service:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analyzing and identifying key findings on the bank bjb's Sustainability Bond. b. Offering argument on the substance of the bank bjb's Sustainability Bond. c. Establishing expert opinion on the bank bjb's Sustainability Bond. <p>l. Position: Team Leader Client: PT Pollux Hotels Group Year: Juni 2024 Description of service:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analyzing and identifying key findings on the PT PHG Sustainability Link Bond. b. Offering argument on the substance of the PT PHG's SLB. c. Establishing expert opinion on the PT PHG Sustainability Link Bond. <p>m. Position: Team Leader Client: PT Bank BNI Tbk Year: Juni 2024 Description of service: Review Annual Report of BNI's Green Bond,</p> <p>n. Position: Team Leader Client: PT TBS Energi Utama Tbk Year: March 2024 Description of service:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analyzing and identifying key findings on the PT TBS's Green Bond b. Offering argument on the substance of the PT TBS's Green Bond c. Establishing expert opinion on the PT TBS's Green Bond <p>O. Position: Team Leader Client: PT SPINDO Tbk Year: March 2024 Description of service:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analyzing and identifying key findings on the PT SPINDO Sustainability Link Bond. b. Offering argument on the substance of the PT SPINDO's SLB. c. Establishing expert opinion on the PT Spindo Sustainability Link Bond <p>Position: Team Leader</p>
--	--

	<p>Client: PT BRI Year: February 2024</p> <p>P. Description of service:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Review Annual Report of BRI's Green Bond 2) Review Annual Report of BRI's Medium Term Note 3) Review Annual Report of BRI's Obligasi Sub Ordinas <p>q. Position: Team Leader Client: PT BSI Year: December 2023 Description of service:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analyzing and identifying key findings on the PT BSI Sustainability Sukuk. 2) Offering argument on the substance of the PT BSI Sustainability Sukuk. 3) Establishing expert opinion on the BSI Sustainability Sukuk. <p>r. Position: Team Leader Client: PT Bank Mandiri Tbk Year: December 2023 Description of service: Review Annual Report of Mandiri's Green Bond,</p> <p>s. Position : Team Leader Client : Technopolis Year : November 2023 Description of service: Evaluation of AFD's contribution to the SDGs in Indonesia especially private sectors assignment, improve collective urban services, and strengthen the effectiveness of public finances</p> <p>t. Position: Team Leader Client: PT IIF Year: October 2023 Description of service:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analyzing and identifying key findings on the PT IIF Green Perpetual Notes. 2) Offering argument on the substance of the PT IIF Green Perpetual Notes. 3) Establishing an environmental expert opinion on the PT IIF Green Perpetual Notes <p>u. Position: Team Leader Client: PT Arkora Hydro Year: August 2023 Description of service:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analyzing and identifying key findings on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework. 2) Offering argument on the substance of the PT Arkora Hydro Green Bond Framework. 3) Establishing an environmental expert opinion on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework. <p>v. Position: Team Member Client: PT Bank Mandiri Tbk Year: March 2023 Description of service:</p>
--	--

- 1) *Analyzing and identifying key findings on the Bank Mandiri's Green Bond Framework.*
- 2) *Offering argument on the substance of the Bank Mandiri's Green Bond Framework.*
- 3) *Establishing an environmental expert opinion on the Bank Mandiri's Green Bond Framework.*

w. **Position:** *Team Leader*

Client: *PT BRI Tbk*

Year: *February 2023*

Description of service: *Review Annual Report of BRI's Green Bond*

x. **Position:** *Team leader*

Client: *PT Pegadaian, Tbk*

Year: *August 2022*

Description of service:

- 1) *Prepare an initial draft of the Pegadaian Green Bond framework.*
- 2) *Collect all information and data that has been done by the Experts in the framework.*

y. **Position:** *Team Leader*

Client: *PT BRI*

Year: *April 2022*

Description of service:

- 1) *Analyzing and identifying key findings on the BRI Green Bond Framework.*
- 2) *Offering argument on the substance of the BRI Green Bond Framework.*
- 3) *Establishing an environmental expert opinion on the BRI Green Bond Framework*

Professional Staff

i. **Position** : *Commissioner*

Institution: *PT Emisi Bersih Dunia/World Net Emissions*

Year: *Oct 2023-Now*

ii. **Position:** *Sustainability Expert and Advisor*

Institution: *CEO PT Agra Resources*

Year: *Sept 2021-Now*

iii. **Position:** *Team leader*

Institution: *Sustainable Investment and Sectoral initiative of Tropical Forest Alliance South East Asia*

Year: *October 2021-October 2023*

iv. **Position:** *Executive Director*

Institution: *Belantara Foundation, Jakarta*

Year: *August 2017 – August 2021*

Description:

Fundraising & Communications

- a. *Oversee day to day grant making to ensure efficient and effective management of the landscape conservation programme;*
- b. *Oversee fund raising activities and create fundraising plans targeted at major environmental foundations national governments, corporations and multilateral institutions.*
- c. *Project Delivery*
- d. *Utilize landscape approach modeling for the Foundation;*
- e. *Play a significant role in implementing the landscape conservation programme monitoring framework, including performing data*

	<p>collection entry and analysis;</p> <p>f. Prepare materials related to monitoring and landscape conservation result, including annual monitoring reports, reporting guidelines, training materials and communications materials;</p> <p>g. Engage with grantees and donors to ensure accurate reporting of project impacts.</p> <p>v. Position: Terrestrial Program Director Institution: Conservation International Indonesia, Jakarta Year: September 2016 - July 2017 Description: Oversee the Conservation programs in the terrestrial included forest and its landscape in Indonesia which included activities on conservation science, policies, planning and implementation of the terrestrial programs in Indonesia; overseeing national policy works related to climate change mitigation and adaptation in the landscape, biodiversity conservation management and developing and executing strategies such as Sustainable landscape partnership program (SLP); liaising closely with CI Indonesia Vice President, and Advisors, CI-I Program Managers, CI-I Jakarta team, CI Asia-Pacific Field Division and CI-Headquarter.</p> <p>vi. Position: Head of Sustainability Institution: PT Royal Lestaro Utama (Join Venture Michelin and Barito Pasific) Year: 2014-2016 Description: to ensure the company operates sustainably. They develop and implement sustainability strategies, ensure regulatory compliance, and communicate sustainability initiatives to stakeholders.</p> <p>vii. Position: Senior Manager Institution: PT Bukit Baiduri Energi Year: 2012-2014 Description: to ensure the company operates sustainably. They develop and implement sustainability strategies, ensure regulatory compliance, and communicate sustainability initiatives to stakeholders.</p> <p>viii. Position: Sustainable Financing Coordinator Institution: Sumatra Initiative of WWF Indonesia Year: 2009 - 2010 Description: To coordinate activities of WWF Indonesia - Conservation Program in Sumatra to achieve Sustainable financing programs.</p> <p>ix. Position: Expansion Protected Area Module Leader Institution: WWF Indonesia Year: 2007 - 2009 Description: To facilitate development of a new conservation area and extension of conservation area in Riau Province. Activities including forest policy aspects, design project proposal and lobbying key stakeholders such as Head of Forest Services Districts, Bupati/Head of District, Governor till Director Jenderal of Ministry of Forestry to obtain recommendation and degree of Minister of Forestry for a new conservation area in Riau Province.</p> <p>x. Position : Senior Conservation Officer Institution : WWF Indonesia Riau Elephant Conservation Program Year : 2004 – 2006 Description:</p>
--	--

	<p><i>Ascertaining facilitation of effective management of Tesso Nilo National Park (Phase I), lobby and advocacy to the related government to reduce encroachment and illegal logging in Tesso Nilo forest area in Riau Province.</i></p>
--	--

3. Prof Dr. Ricardi S. Adnan, MSi.

Profil Singkat		
1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Prof. Dr. Ricardi S. Adnan, MSi.
2	Jabatan Fungsional	Professor, Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia
3	Jabatan Struktural	IV B
4	Penugasan akademik	- Anggota Komite Akademik di Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia - Anggota Senat Akademik FISIP UI
5	Penugasan struktural di UI	Kasubdit Hubungan Alumni Universitas Indonesia 2008-2009 Kepala Kantor Sekretariat Rektor UI 2009 – 2010 Direktur UI Press 2011-2017 Ketua Prodi Pascasarjana Sosiologi UI 2017-2019
6	Penugasan lainnya di luar UI	Tim Pengajar S3 SIK PTIK Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19 (2020-2022)
7	NIDN	0302056703
8	Alamat Kantor	Departemen Sosiologi FISIP-UI Kampus FISIP UI Depok, Gd. C Lt.3
9	Nomor Telepon/Faks	Tel 02178849025 fax 02178849028
10	Alamat e-mail	ricardi.s@ui.ac.id
11	Asosiasi	Anggota Ikatan Sosiologi Indonesia Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia 2016-2019 Ketua Bidang Asosiasi Pengelola Prodi Sosiologi Indonesia 2018-2021 Ketua Bidang Koalisi Kependudukan Indonesia 2023 – sekarang

Pendidikan	
2010	Doktor di bidang Sejarah, Universitas Indonesia dengan topik mengenai Industri Otomotif Indonesia dengan <i>Sandwich-Like Program</i> di Tokyo University, Hibah dari Kemendikbud
2000	Magister dalam Kebijakan Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia
1992	Sarjana Sosiologi, Universitas Indonesia

Prestasi/ penghargaan	
2017	Hibah PITTA untuk karya akhir mahasiswa
2010 - 2011	Warga kehormatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
2009 - 2010	Sandwich-like Program untuk disertasi di Tokyo University dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2009	Hibah Penelitian Disertasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2006	<i>Visiting Research Scholar</i> di National Taiwan University from Republic of China
2005	Pemenang lomba penulisan buku cepat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

	Seminar (diseleksi)	Venue
2023	Tantangan Sosiologi sebagai Ilmu Kajian Masyarakat Pesisir dan Kepulauan (Kuliah Umum)	Universitas Mataram
2021	Institutional Improvement on Tourist Village to Achieve a <i>Sustainable Development Case study: a Remote Area in Eastern Java, Indonesia</i> (online)	Crete Island, Greek

2019	SOCIAL MEDIA CREATE BENEFIT AND CHALLENGE ON TOURISM SIDE A CASE STUDY OF TOURIST AREA IN INDONESIA	Dubrovnik, Croatia
2019	Budaya dan Bencana Alam dalam seminar KSNS VIII di USU Medan	Medan
2018	“Embracing Digital Economy on Millennial Society The Next Social Changing in Indonesia” presented on International Conference on Social and Political Issues in Bali, 25-26 Oct 2018.	Bali
2018	“Poverty Alleviation – Indonesia Experience” Presented on “The Present and Future of Rural Development in China And South and Southeast Asia”, Hebian Village, Yunnan Province 7-9 th November 2018	China
2017	“Borderless Nation in Borderless Society” presented at International Conference “ <i>Sociological for Whom</i> ” Universitas Indonesia, February 4 th , 2017	Jakarta
2016	“Indonesia is Still Becoming a Nation” presented at “International Conference on Nusantara Studies – Reinventing the Nusantara Concept within its Roles and Space”, Universitas Indonesia’s Library, 24-25 November 2016	Depok
2015	The Role of University Book Publishers increasing Indonesia Human Development Index in National Library Seminar. Jakarta	Perpustakaan National, Jakarta
2014	“Social Entrepreneurship of Turkish’ Social Movement in Education” at WEI International Academic Conference, May 18-21 2014	Bali
2013	“Social Transformation through Social Marketing” in <i>International Seminar on Business, Management & Environment: A Comprehensive Study in Asian Economic</i> at Bali on 29 th -30 th Oct, 2013.	Bali
2012	“Indonesia: The Development of State and Society”. In NED Engineering and Technology, Karachi.	Karachi, Pakistan
2011	The Role of Academia as an External Resource of Innovation for the Automotive Industry in Indonesia”, in GRIPS, Tokyo.	Tokyo
2010	Strategic Routing of UI in achieving a World Class University on Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.	Bandung
2009	“Indonesia Landscape of Transformation” on APSA Conference in Bali	Bali
2008	Development Skill for Vocational School Graduates in Tourism Market	Jakarta
2005	<i>Health and Safety Problem in Community Mining</i> in Learning Event of Communities Artisanal and Small Scale Mining (CASM) which be held in Manila from 7 th to the 12 th of June 2005	Manila

	Publikasi (diseleksi)	Penerbit
2023	<i>The Dynamic Role of Moslem in Building Indonesia as a Nation-State</i>	<i>Indonesian Journal of Religion and Society</i>
2023	<i>Institutional Reconstruction of Promoting and Maintaining the Level of Compliance with Health Protocols in Indonesia during the Pandemic</i>	<i>Systemic Practice and Action Research</i>
2023	<i>The Role of Social Capital and Knowledge Capital for Freelance Creative Workers in Audiovisual Industry (2nd author)</i>	<i>The Journal of Society and Media</i>
2023	<i>An Institutional Issue on Football Competition, Indonesia League Tragedy</i>	<i>International Journal of Social Sciences and Human Research</i>

2023	Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran, Jurnal Kependudukan Indonesia (2 nd author)	Jurnal Kependudukan Indonesia
2022	<i>The adaptive science communication model in the middle of VUCA era in Indonesia: Study of startup Kok Bisa (2nd author)</i>	Informasi
2022	<i>Covid-19 Pandemic and Institutional Reconstruction Towards a New Normal Life</i>	IJRS Lasigo
2021	<i>THE TRANSFORMATION OF SCIENCE COMMUNICATION IN VUCA ERA:</i>	Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
2017	“Energi Baru Terbarukan dan Tantangan Implementasinya di Indonesia” dalam <i>Pertamina Energy Institute Vol 3, No 4 Okt – Des 2017</i>	Pertamina Energy Institute, Jakarta
2016	“Rezim Birokrasi dan Administrasi” Pengantar Redaksi pada Masyarakat Jurnal Sosiologi Vol 20 no 2 tahun 2015	Jurnal Sosiologi, Universitas Indonesia
2015	<i>Ekonomi dalam Perspektif Ilmu Sosial - Spesialisasi dan Konvergensi Ilmu</i> , UI Press 2015. with Banu Muhammad Haidlir,	UI Press
2014	Dinamika Struktur Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia” dalam <i>Jurnal Sosiologi - Masyarakat</i> . Vol 19 No 1 Januari 2014.	Jurnal Sosiologi, Universitas Indonesia
2013	<i>Transformasi Pemasaran Sosial yang Mengubah Wajah Indonesia</i> , Jakarta: UIPress, 2013.	UI Press
2013	“Indonesia: Challenges and Hopes of Reformation as State and Society” in <i>Journal of Social Sciences and Interdisciplinary Research</i> . Vol2. Number 2. December 2013.	JSSIR, NED, Pakistan
2012	“The Role of Academia as an External Resource of Innovation for the Automotive Industry in Indonesia”, in <i>Asian Journal of Technology Innovation</i> vol 20 No S1, 2012, 99-100. Routledge, UK.	Routledge, UK